



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VI DPR RI**

#### **BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	: 6 (Enam)
Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
Hari, Tanggal	: Selasa, 5 September 2023
Pukul	: 13.30 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka.
Pimpinan Rapat	: Martin Manurung, S.E., M.A/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan mengenai: <ol style="list-style-type: none"><li>1. RKA KL Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran); dan</li><li>2. Pelaksanaan anggaran s.d triwulan II TA 2023.</li></ol>
Hadir	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. 18 Orang dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI;</li><li>2. Kepala Badan Standardisasi Nasional, Bapak Kuku S. Achmad;</li><li>3. Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bapak Yudi Hidayat, S.E., M.Si;</li><li>4. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bapak Muhammad Rudi;</li><li>5. Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Bapak Marthunis, S.T., D.E.A.</li></ol> Beserta jajaran.

## I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional, Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada pukul 14.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat di skors pada pukul 14.01 WIB dan dicabut kembali pada pukul 14.02 WIB
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 5 September 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., M.A.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai Realisasi Anggaran sampai Triwulan II TA 2023 dan Pagu Anggaran TA 2024.
2. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan nomor B.664/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus T.A 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga T.A. 2024, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp.228.483.822.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
  - a. Program Standardisasi Nasional sebesar Rp.93.559.866.000,- (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*);
  - b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.134.923.956.000,- (*Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Untuk selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

3. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan nomor B.664/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus T.A 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga T.A. 2024, Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp.62.306.538.000,- (*Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
  - a. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp.24.663.247.000,- (*Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
  - b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.37.673.291.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).Untuk selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.
4. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) terkait usulan tambahan pagu anggaran BPKS T.A 2024 sebesar Rp.99.082.550.000,- (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang akan dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis.
5. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan nomor B.664/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus T.A 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga T.A. 2024, Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) mendapatkan Pagu Anggaran sebesar 2.662.635.880.000,- (*Dua Triliun Enam Ratus Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
  - a. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp.1.756.121.600.000,- (*Satu Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu*

*Rupiah);*

- b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.906.514.280.000,- (*Sembilan Ratus Enam Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Untuk selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

6. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) terkait usulan tambahan pagu anggaran BP Batam T.A 2024 sesuai surat Wakil Kepala BP Batam No. B-248/WK/AL.00.01/7/2023 tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp.850.000.000.000,- (*Delapan Ratus Lima Puluh Miliar*) yang akan dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis dengan rincian :

- a. Pembangunan 3000 unit pemukiman sebesar Rp.400.000.000.000,- (*Empat Ratus Miliar Rupiah*).
- b. Pengembangan jalan sepanjang 16,9 km sebesar Rp.400.000.000.000,- (*Empat Ratus Miliar Rupiah*).
- c. Pemeliharaan jalan sepanjang 272,16 km sebesar Rp.50.000.000.000,- (*Lima Puluh Miliar Rupiah*).

7. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan nomor B.664/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus T.A 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga T.A. 2024, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp.115.485.314.000,- (*Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:

- a. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp.23.695.637.000,- (*Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.91.789.677.000,- (*Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)

Untuk selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

8. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 55.988.585.000,- (*Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang akan dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis dengan rincian :
  - a. Program Pengawasan Persaingan Usaha diajukan tambahan anggaran sebesar Rp 39.165.522.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).
  - b. Program Dukungan Manajemen diajukan tambahan anggaran sebesar Rp 16.823.063.000,- (*Enam Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
9. Komisi VI meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk terus berupaya meningkatkan kinerja kementerian agar percepatan realisasi Anggaran TA 2023 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah direncanakan.
10. Komisi VI DPR RI bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) akan melakukan pembahasan RKA/KL Tahun 2024 kembali sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dalam waktu yang akan ditentukan kemudian.
11. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.48 WIB.

**KEPALA BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL**

Ttd.

**KUKUH S. ACHMAD**

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MARTIN MANURUNG, S.E., M.A  
A-352**

**WAKIL KETUA KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA**

Ttd.

**YUDI HIDAYAT**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN  
BEBAS BATAM**

Ttd.

**MUHAMMAD RUDI**

**Pit. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS SABANG**

Ttd.

**MARTHUNIS**